

ABSTRAK

Aldiansyah lestari (1183040014), 2023. “*Kedudukan Hukum Game Slot Online Menurut KUHP Dihubungkan Dengan Kedudukan Hukum Menurut QANUN Aceh Nomor 6 Tahun 2014.*”

Manusia adalah makhluk Allah SWT yang diwajibkan untuk menjalani perintahnya dan menjauhi segala larangannya, salah satu perintah yang diwajibkan ialah untuk bekerja keras dan mencari rizki untuk menghidupi kebutuhannya sesuai syari’at. Akan tetapi, saat ini banyaknya orang yang dengan sengaja melakukan perjudian untuk menghidupi kebutuhannya tanpa bekerja keras dengan melakukan permainan game slot online yang sudah jelas ketentuannya haram baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Maka dari itu di Indonesia memberlakukan terkait konsep aturan atau sanksi terhadap pelaku perjudian, dimana peraturan tersebut diatur dalam KUHP Pasal 303 dan 303bis serta diatur dalam Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014.

Penelitian ini bertujuan di antara lain; (1). Mengetahui persamaan dan perbedaan konsep perjudian game slot online menurut kitab Undang-Undang hukum Pidana dan Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014; (2). Mengetahui kedudukan hukum game slot online menurut kitab Undang-Undang hukum Pidana dan Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014; (3). Mengetahui relevansi kedudukan hukum menurut kitab Undang-Undang hukum Pidana dan kedudukan hukum menurut Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 dihubungkan dengan game slot online.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah (1). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946 BAB XIV Tentang Kejahatan Terhadap Kesopanan dan Undang-Undang nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban, (2). Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan komparatif (perbandingan). Teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) dengan membaca, meneliti, menelaah berbagai buku dan jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian.

Peneliti menyimpulkan; (1). Persamaan konsep KUHP dan Qanun Aceh memiliki tujuan untuk menghilangkan dan membuat jera pelaku, supaya terciptanya ketentraman. Dari sisi perbedaan KUHP membolehkan praktik perjudian ketika mendapat izin dari pihak berwenang, sedangkan Qanun Aceh tidak menerima adanya perjudian sama sekali; (2). Kedudukan hukum KUHP dilatarbelakangi berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP dalam BAB XIV Tentang Kejahatan Terhadap Kesopanan, dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Adapun Qanun Aceh dilatarbelakangi dengan pemberlakuan syariat Islam; (3). Hubungan atau relevansi kedudukan hukum antara KUHP dan Qanun Aceh, terletak pada tujuan untuk memelihara agama, moral terhadap Pancasila, memelihara harta dan benda, supaya tetap terjaga keberkahannya.

Kata kunci; *Kedudukan Hukum; KUHP; Qanun Aceh.*